



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ERWAN SETIAWAN
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 177199

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 20.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1655 m2/978 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 9.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/390 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/328 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAH , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.105.000.000

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 20047 4WD AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER S R60 COUNTRYMAN Tahun 2013, LAINNYA Rp. 500.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N-MAX 2 DP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BG6 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.970.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	23.350.000.000
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	23.230.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

